



KERJASAMA POLDA JAWA TIMUR DAN TNI AU GUNA MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME

*(COOPERATION WITH EAST JAVA REGIONAL POLICE AND TNI AU TO DEAL WITH
TERROR THREATS)*

Meby Trisono, M. Kemalsyah, Sri Murtiana
Program Studi Master Operasi Udara
e-mail: trisonomeby@gmail.com

Abstrak; Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman terorisme di wilayah Jawa Timur, Terorisme yang merupakan salah satu bentuk ancaman nasional menjadi perhatian khusus baik dari institusi TNI maupun Polri karena dapat membahayakan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kerja sama Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori intelijen, teori Kerja sama dan teori terorisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa; Pertama, kerja sama Polda Jatim dan TNI AU dalam penanggulangan ancaman terorisme dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kerja sama pertukaran informasi intelijen dan kerja sama penggunaan sarana dan prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU guna Menghadapi Ancaman Terorisme. Kedua, strategi meningkatkan kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional antara lain; Pertukaran Informasi dan Intelijen yang Ditingkatkan, Kolaborasi dalam Pelatihan dan Latihan Simulasi Penanggulangan Terorisme Bersama, Pembentukan Tim Gabungan, Pengembangan Strategi dan Protokol Bersama, Memprioritaskan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang intelijen dan Pemanfaatan Peralatan dan Teknologi Canggih, Penyusunan Rencana Operasional Bersama, Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, dan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Melalui kerja sama yang terkoordinasi, keduanya dapat bekerja sama untuk mengatasi potensi ancaman terorisme dengan lebih efektif. Sinergi antara kepolisian dan militer ini menjadi kunci dalam melindungi keamanan negara, khususnya di wilayah strategis seperti Bandara Juanda Surabaya. Upaya bersama ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman aksi terorisme. Dengan demikian, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Kata Kunci: Kerja sama, Ancaman, Terorisme, Keamanan Nasional



Abstract; *This research is motivated by the existence of the threat of terrorism in the East Java region. Terrorism, which is a form of national threat, is of particular concern to both the TNI and Polri institutions because it can endanger the country. Based on this, the problem is formulated, namely how to cooperate with the East Java Regional Police and the Indonesian Air Force to overcome the threat of terrorism in order to maintain national security stability. The purpose of this research is to analyze the collaboration between the East Java Regional Police and the Indonesian Air Force to overcome the threat of terrorism in order to maintain national security stability. The theory used in this research is intelligence theory, cooperation theory and terrorism theory. The method used is a qualitative method. The results of this study concluded that; First, the cooperation between the East Java Regional Police and the Indonesian Air Force in countering the threat of terrorism can be divided into two categories, namely cooperation in the exchange of intelligence information and cooperation in the use of facilities and infrastructure between the East Java Regional Police and the Indonesian Air Force to Face Terrorism Threats. Second, the strategy for increasing cooperation between the East Java Regional Police and the Indonesian Air Force in countering the threat of terrorism in order to maintain national security stability, among others; Enhanced Information and Intelligence Exchange, Collaboration in Joint Counter-Terrorism Training and Simulation Exercises, Formation of Joint Teams, Development of Joint Strategies and Protocols, Prioritizing members who have competence and intelligence background and Utilization of Advanced Equipment and Technology, Compilation of Joint Operational Plans, Improved Coordination and Communication, and Preparation of Contingency Plans. The conclusion of this study is that cooperation between the East Java Regional Police and the Indonesian Air Force in handling the threat of terrorism has an important role in maintaining national security stability. Through coordinated cooperation, the two can work together to more effectively address potential threats of terrorism. This synergy between the police and the military is key in protecting national security, especially in strategic areas such as Surabaya's Juanda Airport. This joint effort is expected to increase the level of security and provide protection to the public from the threat of acts of terrorism. Thus, this cooperation is a strategic step in maintaining national stability and security.*

Keywords: *Cooperation, Threats, Terrorism, National Security*

1. Pendahuluan

Keamanan nasional adalah konsep yang mencakup upaya untuk melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal yang dapat mengganggu stabilitas politik, keutuhan teritorial, dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, stabilitas keamanan nasional bisa diartikan sebagai kondisi di mana negara mempertahankan tingkat keamanan yang konsisten dan tidak terganggu oleh ancaman internal maupun eksternal. Hal ini mencakup stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, serta keutuhan teritorial negara. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 mengemukakan bahwa Kepolisian

Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sementara Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengemukakan bahwa peran TNI Angkatan Udara dalam usaha pertahanan negara adalah melaksanakan tugas TNI matra udara dibidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Kedua institusi tersebut diharapkan dapat menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Terorisme yang merupakan salah satu bentuk ancaman nasional menjadi perhatian khusus baik dari institusi TNI maupun Polri karena dapat membahayakan negara. Kasus terorisme di Indonesia memiliki catatan sejarah tersendiri, berdasarkan laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ada 370 tersangka terorisme di Tanah Air pada 2021. Padahal, jumlah tersangka terorisme pada tahun sebelumnya sebanyak 232 tersangka. Ini artinya, ada kenaikan 59,48% dibanding 2020. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa salah satu yang mempengaruhi stabilitas keamanan adalah ancaman terorisme. Selain itu, menurut data dari *Global Terrorism Data Base*, terdapat ada 638 insiden terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2020. Pada periode tersebut, insiden terorisme paling banyak terjadi pada 2001 dengan total 106 insiden. Sementara insiden terorisme paling sedikit pada 2007 yaitu sebanyak 2 kali. Salah satu jaringan terorisme yang teridentifikasi hasil *profiling* Densus 88 Anti Teror yang sering melakukan rentetan aksi teror di Indonesia adalah kelompok JAD atau dikenal dengan Jamaah Ansharut Daulah. JAD adalah jaringan terorisme yang berafiliasi dengan negara Islam Irak dan Syria (ISIS) yang merupakan salah satu organisasi radikal yang masuk ke Indonesia. Selain JAD terdapat pula beberapa organisasi radikal lainnya seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshar Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN),



Jamaah Tauhid Wal Jihad (JTW), Jamaah Anshar Khalifah Daulah Nusantara (JAKDN). Untuk kasus terorisme yang pernah terjadi di Jawa Timur antara lain bom bunuh diri di Gereja Santa Maria, lalu Gereja Pantekosta Surabaya, dan yang cukup menjadi perhatian adalah penyerangan terhadap markas Polrestabes Surabaya di jalan Sikatan pada tahun 2018 dengan cara bom bunuh diri yang pelakunya merupakan satu keluarga. Selain itu Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak pelaku terorisme berasal, di samping banyak pula para Napiter dan eks napiter berdomisili di wilayah Jawa Timur. Kasus terakhir terkait pengungkapan pelaku terorisme yang tercatat adalah penangkapan terhadap 8 (delapan) orang diduga pelaku terorisme kelompok *Usman bin Sef alias Fahim cs* (yang terlibat dalam rangkaian Bom Bali 2), para pelaku teror tersebut ditangkap di Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo oleh Densus 88 Anti Teror bersama Polresta Sidoarjo, kemudian kedelapan pelaku tersebut dibawa menggunakan pesawat *charter* melalui Bandara Juanda dengan pengamanan bersama TNI AU Lanud Muljono ke Jakarta. Kegiatan kolaboratif tersebut antara TNI AU dan Polri menunjukkan penting sebuah kerja sama dalam penanggulangan terorisme.

Kerja sama Polri dan TNI dalam menghadapi ancaman terorisme menjadi bahasan yang penting untuk dikembangkan, urgensi sebuah kerja sama adalah pentingnya untuk bekerja sama dan berkolaborasi antara individu, kelompok, organisasi, atau negara dalam mencapai tujuan bersama, menghadapi tantangan, atau mengatasi masalah yang kompleks. Kerja sama merupakan aspek kunci dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan, berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, serta mengoptimalkan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika bekerja sendiri (Deni Dadang et al.2021). Dalam konteks penelitian ini kerja sama antara TNI dan Polri menjadi salah satu kunci dalam menghadapi permasalahan terorisme. Berdasarkan ide pokok permasalahan tersebut penelitian ini akan mengangkat topik tentang optimalisasi kerja sama Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme. Terdapat beberapa Penelitian terdahulu yang relevan dengan tulisan ini antara yaitu; (Boy et al., 2020; Dilianto, 2021; Farhan & Heniarti, 2019; Prasetyo, 2016; Putra, 2021). Dalam konteks ini, terdapat perbedaan dan persamaan

dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi, skala, atau periode penelitian. Penelitian sebelumnya telah meneliti kerja sama intelijen antara lembaga lain atau dalam lingkup yang berbeda. Sementara penelitian ini lebih fokus pada kerja sama Polda Jatim dan TNI AU, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme di wilayah Bandara Juanda Surabaya. Dengan memahami perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperkaya dan memvalidasi temuan yang ada sebelumnya serta memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman terorisme. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut serta belum adanya penelitian yang sama maka Peneliti melakukan kajian yang mendalam Kerja sama Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman Terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan demikian diperlukan kerja sama yang lebih antara Polda Jatim dan TNI AU terutama di bidang intelijen yang menjadi ujung tombak sebagai *early warning* dan *early detection*, mata dan telinga pimpinan melalui operasi intelijen.

Kerja sama Intelijen TNI AU dan Polda Jatim melalui operasi intelijen pada OMSP selama ini hanya sebatas pada koordinasi kegiatan rutin biasa, sebagai contoh masalah penanggulangan bencana seperti kebakaran hutan, pengamanan aksi unjuk rasa di bandara dan pelaporan tamu VVIP melalui bandara Juanda, belum sampai kepada kerja sama yang bersifat kolaboratif yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah operasi khusus. Oleh sebab itu untuk menghadapi permasalahan yang dapat membahayakan negara seperti terorisme maka diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara TNI dengan Polri terutama pada operasi intelijen. Adapun permasalahan dari optimalisasi kerja sama Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme dalam rangka operasi intelijen adalah; kurang optimalnya kerja sama jaringan informasi intelijen, minimnya pertukaran informasi antara TNI dengan Polri dan kurang optimalnya penggunaan peralatan teknologi intelijen yang dimiliki, sehingga penelitian ini bertujuan untuk

menginvestigasi kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

a. **Teori Intelijen.** Secara umum intelijen mempunyai tiga pengertian dasar yaitu intelijen sebagai pengetahuan, intelijen sebagai kegiatan dan intelijen sebagai organisasi. **Pertama,** Intelijen sebagai pengetahuan adalah bahan keterangan (informasi) yang sudah diolah melalui proses pengolahan sehingga bermakna sebagai pengetahuan untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. **Kedua,** Intelijen sebagai organisasi adalah suatu Badan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan intelijen sesuai fungsinya. **Ketiga,** Intelijen sebagai kegiatan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan dengan menggunakan taktik dan teknik intelijen, baik untuk kepentingan taktis maupun strategis (Nefo, 2013).

b. **Teori Kerja sama.** Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Para ahli memberikan definisi tentang “kerja sama dan hasilnya merujuk pada usaha lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan”. Menurut Soekanto kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Max Wiber melalui Teori Birokrasi bahwa kerja sama memberikan kontribusi untuk menguatkan bagian-bagian dalam organisasi yang paling efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuan (Soerjono, 2009). Teori Kerja Sama Max Weber memberikan wawasan tentang bagaimana kerja sama dapat terjadi dalam organisasi dan masyarakat. Weber menekankan pentingnya rasionalitas, struktur birokrasi yang efisien, dan otoritas yang sah sebagai elemen-elemen yang berpengaruh dalam proses kerja sama. Teori Weber dihubungkan dengan kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Beberapa konsep penting termasuk:

- 1) **Rasionalitas tujuan.** Weber menekankan pentingnya rasionalitas tujuan dalam tindakan manusia. Dalam konteks kerja sama, ini berarti bahwa individu atau kelompok yang bekerja sama harus memiliki tujuan yang jelas dan dipahami dengan baik oleh semua anggota. Rasionalitas tujuan membantu mengarahkan upaya menuju pencapaian hasil yang diinginkan.
- 2) **Struktur birokrasi.** Konsep birokrasi Weber membahas tentang struktur organisasi yang terorganisasi dengan baik dan efisien. Dalam kerja sama untuk mencapai tujuan. Struktur birokrasi yang efisien dapat membantu dalam pembagian tugas, koordinasi, dan menghindari tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan kerja sama.
- 3) **Otoritas yang sah.** Weber membedakan tiga jenis otoritas, di antaranya otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional-hukum. Dalam kerja sama, otoritas yang sah dan diterima oleh semua anggota dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul selama proses kerja sama.

c. **Teori Terorisme.** Menurut Laquer (Laqueur, 2016: 7) mengungkapkan bahwa tidak ada definisi terorisme yang mungkin dapat mencakup segala macam jenis terorisme yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Definisi semacam itu tidak ada atau diprediksi tidak akan didapatkan di masa depan). Namun begitu, secara harfiah kata terorisme berasal dari bahasa latin, yaitu *terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”, kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa (Bakti, 2016: 28), dengan kata lain bisa disebut membuat ketakutan. Adapun menurut Hendropriyono (2009: 256-257) mengutarakan bahwa terorisme adalah suatu tindakan yang menyebabkan kengerian, ketakutan, dan rasa panik pada masyarakat karena berbagai aksi perusakan baik secara fisik, psikologis maupun secara verbal. Tindakan ini sangat bervariasi, mulai dari tindakan perusakan, menimbulkan rasa takut sampai pada pembunuhan massal. Aksi terorisme ditempuh karena pada dasarnya, lewat aksi inilah

para teroris, baik kelompok maupun individu, mampu mendapatkan sarana untuk menyuarkan bahkan memenuhi tujuan-tujuan mereka yang biasanya adalah tujuan politik namun sering menggunakan atribut keagamaan demi mendapat dukungan dari kelompok atau aliran tertentu. Sedangkan menurut Golose (2009: 6) terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebar teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

d. Teori Stabilitas. Teori Stabilitas mengacu pada pandangan tentang pentingnya menjaga stabilitas dalam suatu sistem politik, sosial, atau ekonomi. Konsep stabilitas ini menekankan pentingnya menghindari konflik, kerusuhan, dan perubahan yang drastis yang dapat mengganggu keseimbangan dalam suatu negara atau masyarakat. Teori ini berfokus pada upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi yang relatif stabil dan harmonis agar fungsi-fungsi pemerintahan, ekonomi, dan sosial dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan yang berarti (Buzan et al., 1998).

e. Teori Keamanan Nasional. Teori Keamanan Nasional berfokus pada upaya negara atau pemerintah untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan kekuatan militer yang handal dan memiliki strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi negara dari berbagai bentuk ancaman seperti agresi militer, terorisme, perang saudara, dan ancaman siber (Morgenthau, 1967).

f. Teori Ancaman. Teori Ancaman membahas tentang berbagai jenis ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan suatu negara. Ancaman dapat berupa ancaman militer, ancaman ekonomi, ancaman politik, ancaman terorisme, ancaman lingkungan, dan lain sebagainya. Teori ini menganalisis sumber, karakteristik, dan dampak dari berbagai ancaman tersebut serta mencari cara-cara untuk menghadapinya dan menguranginya agar negara dapat tetap menjaga stabilitas dan keamanan (Dalby, 2009).

3. Metode Penelitian

Pembahasan penulisan jurnal ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil sebagai kesimpulan (Sugiyono, 2007). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara memahami secara holistik/ menyeluruh atas suatu fenomena/ kejadian dan suatu konteks khusus secara deskriptif. Pendekatan kualitatif ini juga digunakan dalam rangka menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Arikunto, 2019).

4. Hasil dan Diskusi

a. Kerja Sama dalam Pertukaran Informasi Intelijen dan Penggunaan Sarana serta Prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme.

1) Pertukaran Informasi Intelijen antar Institusi

Berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya diketahui bahwa Kerja sama intelijen TNI AU dengan Polda Jatim selama ini memang belum tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU. Namun ke depan sangat diperlukan kerja sama khusus yang dalam hal kegiatan intelijen terutama yang berkaitan dengan Intelijen Udara yang tidak bisa dijangkau oleh Intelijen keamanan Polda Jatim. Intelijen Polda Jatim merupakan salah satu fungsi kepolisian yang mendukung tugas pokok, fungsi dan peran

Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam lingkup masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo saja, tidak bisa menjangkau informasi udara secara detail. Wilayah Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sidoarjo memiliki Bandara Internasional sebagai salah satu pintu masuk paling timur pulau Jawa. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama intelijen sebagai deteksi dini untuk mengantisipasi kejadian yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas bahkan dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Dalam menghadapi ancaman terorisme, selain Polda Jatim dan TNI AU, kerja sama efektif dengan melibatkan institusi lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Daerah (Polda) lainnya, dan instansi keamanan terkait. Pelibatan lebih banyak institusi dapat meningkatkan kerja sama lintas sektor dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif menghadapi ancaman terorisme terutama dalam pertukaran informasi antar institusi.

Jika dihadapkan pada **teori kerja sama** Soekanto yang menyebutkan bahwa kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut menurut Max Wiber melalui Teori Birokrasi bahwa kerja sama memberikan kontribusi untuk menguatkan bagian-bagian dalam organisasi yang paling efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, jika dihadapkan pada **teori intelijen** yang menyebutkan bahwa intelijen dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, intelijen sebagai kegiatan dan intelijen sebagai organisasi, maka institusi TNI AU dan Polda Jatim memiliki tugas dalam pelaksanaan intelijen dengan fungsi sebagai organisasi, pengetahuan dan kegiatan.

Berdasarkan kedua teori tersebut maka kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen antara Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme diharapkan dapat berkontribusi untuk menguatkan sistem keamanan untuk mencapai tujuan yaitu terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri. Pertukaran informasi intelijen antara Polda Jatim dan TNI AU merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman terorisme dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Kerja sama ini melibatkan sinergi antara penegak

hukum dan militer dalam upaya mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menghadapi ancaman terorisme.

a) Kontribusi Intelijen TNI AU kepada Intelijen keamanan Polda Jatim.

Intelijen TNI AU memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengatasi terorisme di wilayah Jawa Timur dan mendukung upaya keamanan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur (Jatim). Berikut adalah beberapa kontribusi intelijen TNI AU kepada intelijen keamanan Polda Jatim:

(1) Intelijen TNI AU dapat berperan aktif dalam pertukaran informasi intelijen dengan Polda Jatim. Mereka dapat saling berbagi data terkait ancaman terorisme, intelijen tentang kelompok teroris, pergerakan teroris, dan kegiatan terorisme yang relevan di wilayah Jawa Timur. Pertukaran informasi ini memperkaya pemahaman intelijen keamanan Polda Jatim dan membantu mereka dalam menyusun strategi dan tindakan penanggulangan yang lebih efektif.

(2) Intelijen TNI AU dapat berkolaborasi dengan intelijen keamanan Polda Jatim dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi intelijen yang diperoleh. Kerja sama ini memungkinkan identifikasi pola, tren, dan potensi ancaman terorisme yang mempengaruhi wilayah Jawa Timur secara lebih komprehensif. Dengan adanya analisis dan evaluasi bersama, intelijen keamanan Polda Jatim dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman terorisme dan mengambil tindakan yang tepat.

(3) Intelijen TNI AU memiliki keahlian dan sumber daya teknis yang dapat didukung oleh intelijen keamanan Polda Jatim dalam menghadapi terorisme. Mereka dapat menyediakan dukungan dalam hal pemantauan dan pengintaian udara menggunakan teknologi canggih, analisis citra, pengumpulan data elektronik, dan interpretasi informasi terkait kegiatan teroris. Dukungan ini memperkuat kapabilitas intelijen keamanan Polda Jatim dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengatasi terorisme.

Operasi Intelijen TNI AU terdiri dari beberapa jenis operasi udara dalam OMSP yaitu:¹ Operasi Intelijen Udara (Pengintaian Udara, *Signal Intelligence*, Kecerdasan Manusia, *Imagery Intelligence*, *Electronic Warfare*, Kontra Intelijen, Intelijen Luar Angkasa, Kecerdasan Sumber Terbuka), Operasi Pengamatan Udara (Ops Matud), dan Operasi Pengintaian Udara (Ops Intud).

b) Kontribusi intelijen keamanan Polda Jatim kepada intelijen TNI AU.

Intelijen keamanan Polda Jawa Timur (Jatim) juga memberikan kontribusi penting kepada intelijen TNI AU dalam mengatasi terorisme di wilayah Jawa Timur. Berikut adalah beberapa kontribusi intelijen keamanan Polda Jatim kepada intelijen TNI AU:

(1) Intelijen keamanan Polda Jatim dapat berperan aktif dalam pertukaran informasi intelijen dengan intelijen TNI AU. Mereka dapat menyediakan data terkait ancaman terorisme, intelijen tentang kelompok teroris, pergerakan teroris, dan kegiatan terorisme yang relevan di wilayah Jawa Timur. Pertukaran informasi ini memperkaya pemahaman intelijen TNI AU dan membantu mereka dalam menyusun strategi dan tindakan penanggulangan yang lebih efektif.

(2) Intelijen keamanan Polda Jatim dapat berkolaborasi dengan intelijen TNI AU dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi intelijen yang diperoleh. Kerja sama ini memungkinkan identifikasi pola, tren, dan potensi ancaman terorisme yang mempengaruhi wilayah Jawa Timur secara lebih komprehensif. Dengan adanya analisis dan evaluasi bersama, intelijen TNI AU dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman terorisme di wilayah Jawa Timur dan mengambil tindakan yang tepat.

(3) Intelijen keamanan Polda Jatim dapat memberikan informasi tentang kegiatan teroris yang terdeteksi di wilayah Jawa Timur kepada intelijen TNI AU. Mereka dapat memantau, mengidentifikasi, dan melaporkan kegiatan

¹ Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/371/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Intelijen Dalam Operasi Militer Perang

teroris yang mencurigakan atau indikasi adanya ancaman terorisme kepada intelijen TNI AU. Hal ini memungkinkan intelijen TNI AU untuk mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

(4) Intelijen keamanan Polda Jatim memiliki pemahaman yang mendalam tentang terorisme di wilayah Jawa Timur, termasuk kelompok teroris lokal, jaringan, dan dinamika yang terkait. Mereka dapat menyediakan kajian terorisme lokal kepada intelijen TNI AU, yang akan membantu dalam pemahaman terhadap keadaan terorisme di wilayah Jawa Timur secara spesifik. Informasi ini dapat digunakan oleh intelijen TNI AU dalam merencanakan operasi penanggulangan terorisme yang sesuai dengan konteks lokal.

(5) Pertukaran informasi dari hasil penyadapan. Salah satu keunggulan operasi intelijen keamanan Polresta Sidoarjo adalah operasi penyadapan. Polresta Sidoarjo memiliki alat khusus Hybrid Surveillance Car With Compact Portable Active Intelligent Intercept Satuan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

(6) Pertukaran informasi dari hasil penggalangan. Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Operasi penggalangan ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Polresta Sidoarjo, karena Polresta memiliki personel intelijen yang siap siaga dan tersebar di lapangan, selain itu Polresta

Sidoarjo dapat memberdayakan Babinkamtibmas dalam membantu menyelenggarakan fungsi penggalangan dalam menggali informasi di lapangan. Operasi penggalangan juga mampu melaksanakan kegiatan penggalangan dan pembentukan opini dalam rangka menciptakan kondisi yang diharapkan yang didukung dengan sarana dan prasarana intelijen memadai, sehingga kegiatan pendekatan terhadap target atau sasaran dapat berjalan secara optimal.

2) **Pertukaran Informasi Intelijen dalam rangka Pengamanan Objek Vital Bandara Juanda dari Ancaman Aksi Terorisme.**

Kerja sama intelijen memainkan peran yang sangat penting dalam rangka pengamanan objek vital seperti Bandara Juanda dari ancaman aksi terorisme. Melalui kerja sama ini, berbagai instansi intelijen, seperti intelijen kepolisian, intelijen militer, dan agensi intelijen lainnya, bekerja sama untuk mengumpulkan, menganalisis, dan bertukar informasi terkait ancaman terorisme yang mungkin dihadapi oleh Bandara Juanda. Jika dihadapkan pada teori terorisme yang dikemukakan oleh Golose (2009) bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebar teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Oleh karena itu, pertukaran Informasi Intelijen dalam rangka Pengamanan Objek Vital Bandara Juanda harus dapat mencegah tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity seperti aksi terorisme. Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut adalah beberapa aspek kerja sama intelijen dalam pengamanan objek vital Bandara Juanda dari ancaman terorisme:

- 1) **Koordinasi Penanggulangan Krisis.** Dalam situasi darurat terkait ancaman terorisme, TNI dan Polri perlu menjalin koordinasi yang erat untuk menanggapi dan menangani situasi tersebut. Koordinasi yang baik antara TNI dan Polri sangat

penting dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi ancaman terorisme.

2) **Dukungan Informasi Intelijen.** Instansi intelijen terlibat dalam pertukaran informasi yang berkaitan dengan ancaman terorisme terhadap Bandara Juanda. Informasi ini mencakup intelijen tentang kelompok teroris, modus, taktik, serta kegiatan dan rencana teroris yang mungkin berdampak pada keamanan Bandara Juanda. Dukungan informasi ini memungkinkan semua pihak terlibat untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang ancaman yang ada dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang tepat.

3) **Pemantauan dan Pengintaian.** Instansi intelijen melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap individu atau kelompok yang diduga terkait dengan terorisme dan mungkin berpotensi mengancam Bandara Juanda. Informasi yang diperoleh dari pemantauan dan pengintaian ini akan dianalisis dan digunakan untuk mengidentifikasi ancaman potensial serta mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

4) **Patroli Bersama.** TNI AU dan Polda Jatim dapat melakukan patroli bersama di area sekitar Bandara Juanda. Melalui patroli ini, mereka dapat meningkatkan kehadiran keamanan dan memantau aktivitas yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan terorisme. Patroli bersama ini juga dapat meningkatkan koordinasi antara personel TNI AU dan Polda Jatim, memperkuat kehadiran keamanan, dan memberikan rasa aman kepada pengguna jasa bandara.

5) **Koordinasi dalam Latihan dan Simulasi Keamanan.** TNI AU dan Polda Jatim dapat berkoordinasi dalam melaksanakan latihan dan simulasi keamanan di Bandara Juanda. Melalui latihan ini, personel TNI AU dan Polda Jatim dapat berlatih bersama untuk menghadapi situasi darurat dan skenario terorisme yang mungkin terjadi di bandara. Koordinasi ini memungkinkan pemahaman dan tindakan yang terpadu dalam menangani ancaman terorisme.

6) **Akses Masuk dan Keamanan Fasilitas Bandara.** Bandara Juanda dilengkapi dengan berbagai langkah keamanan untuk melindungi fasilitas fisiknya. Ini termasuk pengaturan akses terbatas ke area-area sensitif, pengawasan melalui kamera CCTV, detektor logam, dan pengamanan perimeternya. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan intelijen TNI AU dan Intelijen Keamanan Polda Jatim dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian ketat terhadap siapa yang masuk dan keluar dari area bandara membantu mencegah ancaman dari luar.

7) **Deteksi Bahan Peledak.** Sistem pengamanan Bandara Juanda dilengkapi dengan teknologi deteksi bahan peledak yang canggih. Ini mencakup penggunaan pemindai sinar-X untuk pemeriksaan bagasi dan barang bawaan penumpang, serta detektor bau dan partikel yang dapat mendeteksi keberadaan bahan peledak atau zat berbahaya lainnya. Oleh karenanya perlu adanya pemeriksaan Keamanan. Pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, barang bawaan, dan kargo merupakan komponen penting dalam sistem pengamanan Bandara Juanda. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan melalui pemindaian sinar-X, pemeriksaan manual, dan pemeriksaan dokumen. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah masuknya benda-benda berbahaya atau terlarang ke dalam bandara dan pesawat. Proses deteksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan intelijen, oleh karena itu perlu adanya keterlibatan intelijen TNI AU dan Intelijen Keamanan Polda Jatim dalam deteksi bahan peledak.

8) **Membekali Personel Keamanan Bandara dengan kemampuan intelijen.** Personel keamanan yang terlatih dan berkualitas tinggi berperan penting dalam sistem pengamanan Bandara Juanda. Mereka melakukan patroli, pengawasan, dan tindakan respons terhadap situasi keamanan yang mencurigakan atau darurat. Personel keamanan juga berperan dalam mengidentifikasi dan menangani ancaman potensial serta memberikan perlindungan kepada penumpang dan fasilitas bandara. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan intelijen TNI AU dan Intelijen Keamanan

Polda Jatim dalam memberikan pelatihan kepada personel keamanan Bandara Juanda dalam rangka membekali kemampuan Intelijen.

b. Kerja sama Penggunaan Sarana dan Prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU guna Menghadapi Ancaman Terorisme.

Kerja sama penggunaan teknologi intelijen antara Polda Jawa Timur dan TNI Angkatan Udara memiliki peran yang penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Melalui kerja sama ini, kedua pihak dapat saling berbagi teknologi yang relevan, meningkatkan kemampuan intelijen, dan mendukung upaya penanggulangan terorisme. Jika dihadapkan pada **teori stabilitas** yang mengemukakan bahwa pentingnya menjaga stabilitas dalam suatu sistem politik, sosial, atau ekonomi.. Maka Kerja sama Penggunaan Sarana dan Prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU guna Menghadapi Ancaman Terorisme sangat berpengaruh pada stabilitas sistem politik, sosial, atau ekonomi wilayah tersebut. Lebih lanjut, jika dihadapkan pada **Teori Keamanan Nasional** yang mengemukakan bahwa upaya negara atau pemerintah untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Maka Kerja sama Penggunaan Sarana dan Prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU guna Menghadapi Ancaman Terorisme merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas negara dari ancaman terorisme. Pertukaran informasi intelijen antara Polda Jatim dan TNI AU melalui teknologi modern memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan analisis yang lebih mendalam terkait ancaman terorisme. Informasi yang diperoleh dari teknologi intelijen ini mencakup perkembangan terkini, aktivitas kelompok teroris, jaringan teroris, serta taktik dan strategi yang digunakan. Polda Jatim dan TNI AU juga dapat saling memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan melalui kamera CCTV, analisis citra, pengumpulan dan analisis data elektronik, serta teknologi pengintaian lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara optimal, keduanya dapat meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan dan analisis intelijen, yang akan membantu mengidentifikasi dan

merespons ancaman terorisme dengan lebih efektif. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup kolaborasi dalam pengembangan teknologi intelijen yang inovatif. Polda Jatim dan TNI AU dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi intelijen. Pengembangan teknologi yang lebih maju akan memberikan keuntungan strategis dalam upaya penanggulangan terorisme. Berikut adalah beberapa aspek kerja sama penggunaan teknologi dan sarpras antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme:

- 1) **Peralatan Komunikasi.** TNI AU maupun Polda Jatim dapat menyediakan peralatan komunikasi khusus, seperti radio portabel, sistem komunikasi satelit, atau peralatan enkripsi, untuk memastikan kelancaran komunikasi antara personel Polda Jatim dalam situasi penanggulangan terorisme. Peralatan komunikasi yang handal akan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat antara anggota tim di lapangan dan pusat komando.
- 2) **Peralatan Khusus.** TNI AU dapat meminjamkan atau menyediakan peralatan khusus yang dibutuhkan oleh Polda Jatim, seperti peralatan pengintaian, perlengkapan anti-peledak, atau peralatan penjinak bom. Peralatan khusus ini akan membantu Polda Jatim dalam mendeteksi, menangani, dan menetralkan bahan-bahan berbahaya yang terkait dengan aktivitas terorisme.
- 3) **Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.** TNI AU dan Polda Jatim dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing dalam menggunakan fasilitas militer jika Polri membutuhkannya dalam operasi penanggulangan terorisme, ataupun sebaliknya. Adapun contoh penggunaan sarpras oleh TNI AU dan Polda yaitu: Pemanfaatan Pesawat dan Helikopter, Pemakaian Fasilitas Militer, Penggunaan Alat-Alat Teknologi, Penggunaan Logistik, Kendaraan dan Transportasi.

c. **Strategi Meningkatkan Kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam Menghadapi Ancaman Terorisme guna Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.**

Jika dihadapkan pada **teori Ancaman** yang menyebutkan bahwa ancaman negara dapat berupa ancaman militer, ancaman ekonomi, ancaman politik, ancaman terorisme, ancaman lingkungan, dan lain sebagainya. Maka ancaman terorisme di wilayah Jawa Timur merupakan bagian dari ancaman yang termasuk dalam kategori ancaman keamanan. Oleh karena itu, dalam konteks Penelitian ini diperlukan suatu strategi kerja sama lintas stakeholder dalam penanggulangan terorisme. Adapun strategi meningkatkan kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional antara lain:

- 1) **Pertukaran Informasi dan Intelijen yang Ditingkatkan.** Dengan memanfaatkan kekuatan dalam akses terhadap informasi intelijen, Polda Jatim dan TNI AU dapat meningkatkan pertukaran informasi dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti kerja sama dengan lembaga intelijen lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 2) **Kolaborasi dalam Pelatihan dan Latihan Simulasi Penanggulangan Terorisme Bersama.** Dengan sumber daya manusia yang profesional dan keahlian yang dimiliki, Polda Jatim dan TNI AU dapat melakukan kolaborasi dalam pelatihan dan latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi ancaman terorisme. Hal ini juga dapat memanfaatkan peluang untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik.
- 3) **Pembentukan Tim Gabungan.** Polda Jatim dan TNI AU dapat membentuk tim gabungan khusus yang terdiri dari personel dari kedua pihak. Tim ini akan menjadi satu entitas yang terlatih dan terampil dalam penanggulangan terorisme, dengan tugas untuk saling mendukung dan bekerja sama secara efektif dalam menghadapi ancaman terorisme di Jawa Timur.
- 4) **Pengembangan Strategi dan Protokol Bersama.** Mengatasi kelemahan dalam koordinasi dan komunikasi dengan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan

strategi dan protokol penanggulangan terorisme bersama antara Polda Jatim dan TNI AU. Hal ini akan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antara kedua pihak dalam menghadapi ancaman terorisme.

5) **Memprioritaskan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang intelijen.** Dalam kerangka kerja sama antara TNI AU dan Polda Jatim dalam penanggulangan terorisme, penting untuk memprioritaskan penempatan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang intelijen. Dengan demikian, anggota yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang intelijen akan menjadi aset berharga dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi intelijen terkait ancaman terorisme. Dengan memprioritaskan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang intelijen, kerja sama antara TNI AU dan Polda Jatim dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami, mengidentifikasi, dan menghadapi ancaman terorisme dengan lebih efektif.

6) **Pemanfaatan Peralatan dan Teknologi Canggih.** Dengan memanfaatkan kekuatan dalam peralatan dan teknologi canggih, Polda Jatim dan TNI AU dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin berkembang. Peralatan dan teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan lebih efektif.

7) **Penyusunan Rencana Operasional Bersama.** Polda Jatim dan TNI AU dapat menyusun rencana operasional bersama yang jelas dan terperinci untuk menghadapi ancaman terorisme. Rencana ini harus mencakup strategi, taktik, alokasi sumber daya, dan peran masing-masing pihak. Dengan memiliki rencana operasional bersama yang terstruktur, kedua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam situasi penanggulangan terorisme.

8) **Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi.** Mengatasi kelemahan dalam koordinasi dan komunikasi dengan menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang. Polda Jatim dan TNI AU perlu meningkatkan kerja sama dan

komunikasi antara personel mereka, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi yang canggih, untuk mengatasi ancaman dengan cepat dan efektif.

9) **Penyusunan Rencana Kontinjensi.** Mengatasi tantangan lingkungan operasional dan keterbatasan sumber daya dengan menyusun rencana kontinjensi yang baik. Polda Jatim dan TNI AU perlu mengidentifikasi potensi ancaman, merumuskan strategi respons, dan mempersiapkan sumber daya yang memadai dalam menghadapi situasi darurat terkait terorisme.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen antara Polda Jatim dan TNI AU guna menghadapi ancaman terorisme diharapkan dapat berkontribusi untuk menguatkan sistem keamanan untuk mencapai tujuan yaitu terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri. Pertukaran informasi intelijen antara Polda Jatim dan TNI AU merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman terorisme dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Kerja sama ini melibatkan sinergi antara penegak hukum dan militer dalam upaya mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menghadapi ancaman terorisme. **Kedua**, kerja sama Penggunaan Sarana dan Prasarana antara Polda Jatim dan TNI AU guna Menghadapi Ancaman Terorisme antara lain kerja sama dalam bidang Peralatan Komunikasi, Peralatan Khusus, dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana. **Ketiga**, strategi meningkatkan kerja sama antara Polda Jatim dan TNI AU dalam menghadapi ancaman terorisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional antara lain; Pertukaran Informasi dan Intelijen yang Ditingkatkan, Kolaborasi dalam Pelatihan dan Latihan Simulasi Penanggulangan Terorisme Bersama, Pembentukan Tim Gabungan, Pengembangan Strategi dan Protokol Bersama, Memprioritaskan anggota yang memiliki kompetensi dan latar belakang intelijen dan Pemanfaatan Peralatan dan Teknologi Canggih, Penyusunan Rencana Operasional Bersama, Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, dan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Diperlukan Evaluasi secara terus-

menerus untuk menilai keberhasilan strategi yang sudah diterapkan dalam penanggulangan ancaman terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Bakti, A. S. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*.
- Boy, B., Legionosuko, T., & Prasetyo, T. Y. B. (2020). Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Di Indonesia. *Peperangan Asimetris (PA)*, 6(1).
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Dalby, S. (2009). *Security and environmental change*. Polity.
- Deni Dadang A.R, Haposan Simatupang, Asti Setya Wardani, & Mhd Halkis, 2021, Perceptions of Indonesia State Civil Apparatus in supporting the Total Defense System before the Covid-19 Pandemic., *Technium Social Sciences Journal*, 15(1)
- Dilianto, A. (2021). Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya). *Peperangan Asimetris (PA)*, 7(2), 167–184.
- Farhan, M. A., & Heniarti, D. D. (2019). Keterlibatan TNI dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Prosiding Ilmu Hukum*, 749–756.
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Penerbit Buku Kompas.
- Laqueur, W. (2016). *A history of terrorism: Expanded edition*. Transaction Publishers.
- Morgenthau, H. J. (1967). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 4e Ed*. Knopf.
- Nefo, S. (2013). *Komunikasi dalam kinerja intelijen keamanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 35–58.



Putra, S. F. (2021). Strategi Satuan Bravo 90 Pasukan Khas Dalam Mengatasi Terorisme Sebagai Implementasi Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Tentara Nasional Indonesia. *Peperangan Asimetris (PA)*, 7(1), 103–126.

Soerjono, S. (2009). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*.

Sugiyono, M. P. P. (2007). Pendekatan Kuantitatif. *Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/ratusan-aksi-terorisme-terjadi-di-indonesia-dalam-2-dekade-terakhir-bagaimana-trennya#> diakses pada 08 Maret 2023

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/371/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Intelijen Dalam Operasi Militer Perang

Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme di ...<https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 20 April 2023

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indones